



PUTUSAN

Nomor 083/Pdt.G/2017/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Leni Natasya binti Rustam, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Dusun Sutejo Jorong Hulu Banda, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;
melawan

Adde Saputra bin Nagur, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Dusun Sutejo Jorong Hulu Banda, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 24 Mei 2017 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 083/Pdt.G/2017/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Januari 2013 di Masjid Al-Musyawah Jorong Hulu Banda, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/I/2013, yang

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No083/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak tanggal 28 Januari 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di tempat kediaman bersama di Dusun Sutejo Jorong Hulu Banda, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Adlen Febri Zhio, umur 19 bulan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berjalan rukun dan harmonis hanya 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat disebabkan Tergugat malas bekerja, setiap kali Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja, Tergugat tidak mau, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugatlah yang bekerja, sedangkan Tergugat tidak mau tahu dengan kewajibannya tersebut;
 - 4.2. Tergugat bersikap cuek dan tidak peduli terhadap keadaan rumah tangga, seperti Tergugat sering meninggalkan Penggugat selama sehari-hari tanpa mau memberi kabar keberadaan Tergugat kepada Penggugat, ketika Penggugat menelphone Tergugat, Tergugat tidak pernah mengangkatnya sehingga hal ini Penggugat sering merasa khawatir;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2016 yang disebabkan oleh ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk merubah kebiasaan Tergugat yang sering meninggalkan Penggugat, Tergugat malah marah kepada Penggugat dan mengatakan kalau hal tersebut bukan urusan Penggugat, mendengar hal tersebut Penggugatpun kecewa kepada Tergugat dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No083/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong Hulu Banda, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sedangkan Penggugat masih tinggal di tempat kediaman bersama di Jorong Hulu Banda, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal yang sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 083/Pdt.G/2017/PA.Min, tanggal 31 Mei

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No083/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan tanggal 09 Juni 2017, ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis tetap menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah Surat Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Karu Tanda Penduduk Atas nama Leni Natasya Nik 1306166410910001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupten Agam tanggal 17 Mei 2012 telah bermaterai cukup dan dinazegellen, setelah diteiti dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam tanggal 28 Januari 2013 yang telah bermaterai cukup dan dinazagellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **Sudirman bin Rustam**, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dusun Sutejo, Jorong Hulu Banda, Kenagarian Malalak Barat,

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan No083/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Malalak dan sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun hanya sekitar dua tahun, setelah itu menurut informasi dari Penggugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan belanja rumah tangga, karena Tergugat pemalas berusaha dan Tergugatlah yang berusaha mencari nafkah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dua kali berpisah rumah, pertama tahun 2015 selama lebih kurang 3 bulan setelah itu bersatu kembali Tergugat berjanji akan merubah sikap jeleknya, namun hal itu hanya bertahan beberapa bulan dan pada awal tahun 2016 terjadi lagi pertengkaran disebabkan masalah yang sama setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah yang sampai sekarang sudah sudah lebih kurang satu tahun 6 bulan lamanya;

- Bahwa usaha damai telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan itu saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. **Darwati binti Rustam**, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jorong Hulu Banda, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak dan sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun rukun saja, yang rukun hanya sekitar dua tahun, setelah itu menurut informasi dari Penggugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan belanja

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No083/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, karena Tergugat pemalas berusaha dan sering pulang larut malam; namun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran mereka;

- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah yang pertama, tahun 2015 Penggugat dan Tergugat didamaikan kembali dan Tergugat berjanji akan merubah sikapnya menjadi orang yang rajin dan tidak akan sering keluar malam hari, kalau keluar akan cepat pulang, hal itu bertahan hanya beberapa bulan setelah itu terjadi lagi pertengkaran dengan alasan yang sama, akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah yang sampai sekarang telah hampir satu setengah tahun lamanya;
- Bahwa usaha damai telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan itu saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No083/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di Dusun Sutejo Jorong Hulu Banda, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1 yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Dusun Sutejo Jorong Hulu Banda, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No083/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Masjid Al-Musyawah Jorong Hulu Banda, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam pada tanggal 25 Januari 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, bermeterai cukup, telah dinazegellen serta cocok dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Januari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat, karena pemalas berusaha dan sering meninggalkan Penggugat tanpa berita, akibatnya sejak bulan Januari 2016 Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan tidak kembali lagi sampaisekarang, sedangkan usaha damaitelah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah keluarga dekat Penggugat, telah memenuhi batas minimal saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No083/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. serta pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2013 yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun cuma sekitar satu tahun, setelah itu sudah seing terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang peduli dan tidak bertanggung jawab memberikan nafkah untuk Penggugat, sering meninggalkan Penggugat tanpa memberi khabar;
- Bahwa akibat sering bertengkar maka sejak Januari 2016 Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang yang lamanya sudah hampir satu setengah tahun;
- Bahwa usaha damai telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, patut diduga bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, rasa kasih sayang antara keduanya telah bertukar dengan kebencian, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar benar telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang bahwa meskipun kedua aksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun pisahnya Penggugat

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No083/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang lamanya sudah hampir satu setengah tahun, masing masing tidak ada lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, menjadi indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup tajam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan alasan tersebut terbukti dipesidangan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Majelis secara ex officio perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No083/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Adde Saputra bin Nagur) terhadap Penggugat (Leni Natasya binti Rustam);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh Dra. Hj. Asnita, sebagai Ketua Majelis, Drs. Amel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Drs. Mawardi sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asnita

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No083/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Arnel

Hakim Anggota,

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Panitera,

Drs. Mawardi

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. HHKL.11.3	: Rp	5.000,00
4. Panggilan Penggugat	: Rp	100.000,00
5. Panggilan Tergugat	: Rp	200.000,00
6. Redaksi	: Rp.	5.000,00
7. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp	396.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan No083/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)